

**POLITIEKE INLICHTINGEN DIENST (PID) PADA MASA PEMERINTAH  
HINDIA BELANDA TAHUN 1916-1942**

Oleh :

**Atik Fajar Kurniawati<sup>1</sup>  
Tri Yuniyanto, Saiful Bachri<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

*The aims of this research are to identify: (1) the Politieke Inlichtingen Dienst history in Hindia-Belanda; (2) the role of Politieke Inlichtingen Dienst in taking care of political stability of Hindia-Belanda government; (3) the forming impact of Politieke Inlichtingen Dienst to the national movement in Hindia-Belanda.*

*This study employed a historical history. The procedure of historical method included heuristic, critical, interpretation, and historiography. Technique of collecting data used was library study. The data source employed in this research was written source. In line with its type, the technique of analyzing data used in this research was historical analysis one.*

*Based on the result of the research, it can be concluded that: (1) Forming of PID was influenced by two factors, there are intern dan ekstern factor. On May 6<sup>th</sup>, 1916, PID was formed by former Common Captain Staff of KNIL, W. Muurling. PID was formed to perceive and observe the possibility of the overseas threat and revolutionary activity in the country; (2) PID has responsibility to collect all information concerning any movement that happened in society. Based on the report which is gotten from PID, Governmental of Colonial can take the correct decision to be applied; (3) Forming impact of PID in Hindia-belanda that is the happening of "Crisis Movement".*

**Keywords:** *PID, National Movement, Political Security, Political Stability.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS.

## PENDAHULUAN

Pada masa kolonial, semua kebijaksanaan pemerintah diarahkan pada kebutuhan penguasa kolonial Belanda guna memenuhi kebutuhannya. Belanda menerapkan sebuah dominasi, *eksploitasi* maupun diskriminasi di dalam sistem kolonialismenya di Indonesia. Hegemoni politik coba diciptakan Belanda di atas negeri jajahannya. Oleh karena itu kondisi yang terbebas dari segala bentuk perlawanan harus dijaga agar pemerintahan tetap stabil. Stabilitas politik sebuah pemerintahan harus senantiasa dijaga agar terlihat apabila kondisi dalam negeri terbebas dari berbagai ancaman, hambatan, gangguan yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan dalam mengejar tercapainya tujuan.

Ancaman terhadap stabilitas politik sebuah negara muncul dari dalam dan luar negara. Ancaman terhadap stabilitas politik terhadap Pemerintah Hindia Belanda banyak muncul pada awal abad ke-20. Kesadaran akan adanya perbaikan nasib membuat rakyat Indonesia memberontak. Takashi Siraishi berpendapat, “Zaman pergerakan di Indonesia dari segi arti pentingnya, dapat dibandingkan dengan munculnya gerakan rakyat di China pada dekade 1910 dan 1920-an, lalu dengan Filipina pada dekade 1880 dan 1890-an, dan dengan Malaya pada tahun-tahun setelah perang” (1990: xv). Selain karena adanya pergerakan radikal dari rakyat pribumi, stabilitas politik Pemerintah Hindia Belanda juga terganggu karena adanya Perang Dunia I. Secara langsung, Perang Dunia I memengaruhi hubungan antara Hindia Belanda dengan Negara Induknya, Kerajaan Belanda.

Ketika mulai banyak terjadi pergerakan radikal serta pemberontakan, salah satu jalan yang diambil oleh Pemerintah Kolonial untuk tetap mempertahankan *status quonya* yaitu dengan membentuk sebuah Dinas Intelijen Politik. Pembentukan Dinas Intelijen Politik oleh Pemerintah Hindia Belanda, dimaksudkan untuk menekan segala ancaman terhadap stabilitas politik pemerintah pada saat itu.

Pembentukan Dinas Intelijen Politik, diharapkan pergerakan nasional dapat ditekan dengan cara pengawasan dan sedikit *intimidasi*. Negara kolonial berkembang menjadi negara polisi (*politiestaat*) (Marieke Bloembergen, 2009). Bahkan Baudet (1961) menyebutkan bahwa Hindia Belanda dengan adanya *Politieke Inlichtingen Dienst* telah berubah menjadi negara polisi yang dapat dibandingkan dengan *Fascisme* Jerman semasa Hitler.

Bagi sebagian orang, sudah sejak lama melihat atau mempersepsikan intelijen sebagai sesuatu yang super, misterius, *glamour*, dan menakutkan. Kesan tersebut semakin berkembang dan mencuat ke permukaan, karena disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, ada pihak atau oknum yang memang ingin menampilkan ciri intelijen yang seolah memiliki imunitas dalam melaksanakan fungsinya, atas nama "demi kepentingan negara".

Dinas Intelijen Politik pada masa Hindia Belanda juga memiliki citra seperti yang disebutkan di atas. Intelijen milik Belanda ini memperlihatkan bagaimana kegiatan intelijen menjadi salah satu kegiatan politik paling menakutkan bagi aktivis pergerakan yang tergabung dalam berbagai organisasi. Pramoedya Ananta Toer dalam romannya yang berjudul *Rumah Kaca* menjelaskan bahwa Dinas Intelijen Politik pada masa Hindia Belanda adalah mata radar Hindia yang ditaruh di mana-mana untuk merekam apa pun yang digiatkan aktivis pergerakan. Pramoedya menyebut politik semacam itu sebagai kegiatan *pe-rumahkaca-an* (2006).

Hal tersebut di atas menyebabkan sedikitnya penelitian mengenai Dinas Intelijen sebuah negara, terutama Dinas Intelijen masa Hindia Belanda yang pada masanya menjadi *momok* menyeramkan bagi rakyat pribumi. Masih kurangnya penelitian yang mengkaji tentang Dinas Intelijen Politik atau *Politieke Inlichtingen Dienst* mengakibatkan peneliti merasa tertarik untuk mengkajinya lebih dalam padahal badan ini memiliki peran yang *urgent* dalam Pemerintahan Hindia-Belanda pada masa Pergerakan Nasional. Kurun waktu yang dipilih yaitu tahun 1916-1942, karena tahun

1916 adalah tahun dibentuknya Dinas Intelijen Politik atau *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID) di Hindia Belanda. Sedangkan tahun 1942 dipilih karena merupakan berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia yang kemudian digantikan oleh kekuasaan Jepang. Berakhirnya kekuasaan Belanda ini secara otomatis membubarkan seluruh tatanan negara Kolonial Hindia Belanda termasuk bubarnya *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID).

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode historis, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian merekonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa literatur, seperti perpustakaan dan museum. Metode sejarah mempunyai beberapa langkah, yaitu : (1) heuristik, yakni menghimpun jejak-jejak masa lampau, (2) kritik, yakni menyelidiki jejak-jejak masa lampau baik bentuk maupun isinya, (3) interpretasi, yakni menetapkan makna saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh, (4) historiografi, yakni menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk tulisan maupun kisah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1919 nomor 27 dan *Memorie van Overgave* (MvO) Komisaris Besar Polisi P. Dekker tanggal 17 Juni 1939. Sumber sekunder yaitu berupa buku, internet, dan jurnal yang relevan dengan judul penelitian. Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah teknik studi kepustakaan, yaitu cara meneliti dengan mempelajari sumber-sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip-arsip, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID)

Sejarah eksistensi Badan Intelijen Politik milik Pemerintah Kolonial tidak terlepas dengan kondisi politik dalam maupun luar negeri saat itu. Pada awal abad ke-20, haluan politik Pemerintah Kolonial berubah karena kaum liberal yang menguasai Kerajaan Belanda menuntut adanya perbaikan nasib negeri jajahan. Pemerintah Kolonial yang telah banyak mengambil keuntungan dari negeri jajahan haruslah mengganti rugi atas apa yang telah mereka ambil. Bangsa Belanda sebagai bangsa yang maju dan bermoral haruslah membayar hutang itu dengan menyelenggarakan Trias: Irigasi, Emigrasi (Transmigrasi), dan Edukasi (Moedjanto, 1988). Trias yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial biasa disebut dengan "Politik Etis" yang terdiri dari Emigrasi, Edukasi, dan Irigasi. Dengan bernaung di bawah apa yang kemudian dikenal sebagai Politik Etis, Pemerintah Hindia-Belanda perlahan-lahan memperluas kesempatan bagi anak-anak Indonesia dari golongan atas untuk mengikuti sekolah-sekolah Berbahasa Belanda tingkat dasar dan menengah (John Ingleson, 1978).

Akibat pelaksanaan Politik Etis yaitu munculnya kaum terpelajar yang merupakan suatu unsur baru dalam masyarakat pribumi di kota-kota Hindia Belanda. Golongan terpelajar atau Robert van Niel (1958) menyebutnya dengan "Elit Modern" kemudian menjadi agen pembaharu dan pelopor Pergerakan Nasional di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kesadaran akan perlunya kemajuan dan kesejahteraan bagi penduduk pribumi kemudian diwujudkan dalam organisasi pergerakan. Maka pada awal abad ke-20, banyak berdiri organisasi pergerakan baik yang bersifat sosial-kebudayaan, keagamaan, maupun politik di Hindia-Belanda. Moedjanto (1988) menyebutkan beberapa organisasi yang berkembang pada masa pergerakan, diantaranya yaitu Boedi Oetomo (BO), Sarekat Dagang

Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, *Indische Partij* (IP), *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV) yang kemudian berubah menjadi Perserikatan Komunis India (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan lain sebagainya.

Di zaman etis, semangat zaman “kemajuan menuju modernitas” juga dirasakan oleh orang-orang Tionghoa dan Arab (Takashi Shiraishi, 1990). Orang-orang Arab mendirikan *Djami’at al-Chair* di Batavia yang mengumpulkan uang untuk mendirikan sekolah dasar dengan kurikulum modern. Begitu pula dengan orang Tionghoa yang pada waktu itu mendirikan *Tiong Hoa Hwe Koan* (THHK, perkumpulan Tionghoa) di Jakarta.

Menggeloranya semangat persatuan di kalangan pribumi membuat kondisi di Hindia Belanda memanas. Nasionalisme yang tumbuh subur di dalam jiwa pemuda-pemudi Indonesia mulai mengarah pada sebuah gerakan revolusioner. Organisasi yang semula bersifat kooperatif terhadap Pemerintah Kolonial berubah menjadi organisasi politik yang radikal. Pergantian Gubernur Jenderal dari Idenburg ke Graaf J. P. van Limburg Stirum (1916-1921) membuat radikalisasi pergerakan memiliki ruang gerak yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan Van Limburg Stirum merupakan seseorang berpaham liberal yang menganggap bahwa semua orang mempunyai kewajiban, hak, dan keadilan yang sama.

Radikalisasi kaum pergerakan tercermin dari perubahan haluan tujuan organisasi pergerakan serta sikap mereka terhadap Pemerintah Kolonial. Misalnya saja Boedi Oetomo yang pada awalnya merupakan organisasi yang berhaluan sosial dan budaya berkembang menjadi salah satu organisasi politik. Dengan program politik, BO bersama-sama dengan SI, ISDV, dan *Insulinde* tergabung dalam *Radicale Concentratie* (RC) yang dalam Bahasa Indonesia dapat disebut dengan “Konsentrasi atau Poros Radikal”.

Selain organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat semakin radikal, muncul pula serikat-serikat sekerja yang radikal. Di Semarang terbentuklah Perserikatan Buruh Kereta Api atau *Vereeniging van Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP). VSTP mempelopori munculnya serikat pekerja lainnya, antara lain PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda), PPPB (Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra), dan PFB (*Personeel Fabriek Bond*) (Sartono Kartodirdjo, 1990). Para buruh yang tergabung dalam serikat sekerja tidak luput dari proses radikalisasi. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an, memunculkan pemogokan pegawai-pegawai pegadaian dalam tahun 1922 dan buruh-buruh kereta api pada tahun 1923.

Selain pergerakan nasional yang semakin bersifat radikal, Perang Dunia I yang meletus pada tahun 1914 dan berakhir pada 1918 sangat memengaruhi Negeri Belanda dan koloni-koloninya. Menurut Robert Van Niel (1958), baik negara induk maupun Hindia Belanda tidak secara langsung terlibat dalam peperangan, tetapi mereka tidak dapat mengelak dari akibat Perang Dunia I. Cindy Adams (1965) menyatakan bahwa hubungan antara Negeri Belanda dan koloninya terputus akibat gangguan peperangan dan perhubungan laut yang sama sekali tidak ada sehingga menyebabkan hubungan politik menjadi lumpuh.

Pada tahun 1918 polisi dihadapkan pada keresahan sosial dan etnis yang meluas, untuk sebagian besar keresahan tersebut disebabkan oleh dampak negatif dari PD I di Eropa (Marieke Bloembergen, 2009). Memburuknya perekonomian, merosotnya kesejahteraan, serta meningkatnya bahaya kelaparan sebagai dampak dari inflasi yang terjadi akibat PD I membuat semakin banyaknya gerakan-gerakan radikal.

Tidak dapat dipungkiri pula, revolusi yang terjadi di Rusia turut memicu semangat para tokoh pergerakan. Pengaruh pemimpin sosialis dan komunis serta bahasa politiknya yang penuh dengan peristilahan

marxistis-revolusioner menyebabkan perjuangan nasional menggeser ke arah antikolonialisme dan anti kapitalisme yang ekstrem-revolusioner (Sartono Kartodirdjo, 1990). Disamping Revolusi Rusia, Empatbelas pasal dari Presiden Woodrow Wilson (Presiden Amerika Serikat ke-28) telah mendapat tanggapan dalam masyarakat Indonesia (Robert Van Niel, 1958). Empatbelas pasal dari Presiden Woodrow Wilson yang banyak menyuarakan tentang hak untuk menentukan nasib bangsa sendiri membuat perasaan anti kolonialis dan imperialis di kalangan kaum pergerakan semakin menonjol.

Meningkatnya suhu politik dalam maupun luar negeri Hindia Belanda, memaksa Pemerintah Kolonial untuk mencari jalan agar kekuasaannya tidak tergulingkan. Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum yang baru dua bulan memegang jabatan tersebut mengeluh kepada Menteri Pleyte (Mei 1916) mengenai kondisi di Hindia Belanda. Berikut keluhan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum kepada Menteri Koloni Pleyte (20-5-1916) seperti yang dikutip Marieke Bloembergen (2009), "Untuk semua urusan, saya tidak mendapatkan informasi memadai, juga tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia bumiputra, kita hanya tahu sepersepuluhnya saja" (hlm. 218).

Keluhan dari Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum tersebut menyadarkan Pemerintah Kolonial bahwa dibutuhkan sebuah badan pengawas khusus pergerakan di Hindia Belanda. Oleh karena itu dibentuklah sebuah Dinas Intelijen Politik pada 6 Mei 1916 dengan nama *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID) (Marieke Bloembergen, 2009). Tujuan pembentukan PID adalah mengamati dan mengawasi kemungkinan adanya ancaman luar negeri dan aktivitas revolusioner dalam negeri.

PID dipimpin oleh mantan Kapten Staf Umum KNIL yaitu W. Muurling (Takashi Shiraishi, 1990). Menurut Takashi, PID didirikan sebagai tindakan sementara untuk mengintai orang asing yang dicurigai dan aktivitas revolusioner. Kantor PID terdapat di beberapa



kota besar yaitu Batavia, Semarang, dan Surabaya serta agen dan mata-mata yang tersebar di seluruh Hindia Belanda (Heather Sutherland, 1983). Agen-agen yang tersebar tersebut biasanya dikonsentrasikan pada wilayah-wilayah yang memiliki kegiatan politik yang radikal, seperti di Jawa dan Sumatera.

Pada bulan April 1919 keputusan pembubaran PID diambil oleh Pemerintah Hindia Belanda. Berakhirnya PD I berkaitan dengan pembubaran Dinas Intelijen Politik milik Hindia Belanda ini. Ketakutan akan adanya ancaman dari luar mulai berkurang serta komunikasi antara negara induk dan Hindia Belanda kembali terbuka sehingga fungsi PID mulai dipertanyakan. Oleh karena itu, PID dibubarkan pada Nopember 1918.

Sehari setelah PID dibubarkan, Jaksa Agung dalam edaran rahasia pada tanggal 3 April 1919 seperti yang dikutip Marieke Bloembergen (2009) menyatakan bahwa, "Memohon kepada kepala pemerintahan daerah untuk melaporkan setiap informasi penting berkenaan dengan aktivitas politik dan pergerakan masyarakat, adanya gangguan terhadap ketertiban umum, rapat-rapat atau pertemuan dan semua hal yang menyangkut kehidupan politik masyarakat" (hlm. 234). Akan tetapi permohonan Jaksa Agung tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa adanya personel yang secara khusus diberi kewenangan. Edaran Jaksa Agung dikeluarkan karena setelah PID dibubarkan, kondisi keamanan dan ketertiban Hindia Belanda oleh pemerintah dinyatakan semakin memburuk.

Pentingnya pembentukan Dinas Intelijen Politik ditegaskan oleh Jaksa Agung pada 9 April 1919. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal seperti yang dikutip oleh Marieke Bloembergen (2009), Jaksa Agung menyatakan bahwa, "Suatu dinas reserse umum (*Algemene Recherchedienst*) sangat diperlukan sebagai sarana pengendalian terpusat, sama seperti sebuah kapal selam membutuhkan periskop" (hlm. 235).

Sebagai langkah sementara, pada 24 September 1919 dibentuklah *Algemene Recherchedienst* (ARD) atau Dinas Penyelidikan Umum. ARD merupakan kelanjutan PID dan memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan pendahulunya. ARD bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan atau aktivitas politik masyarakat bumiputra (Marieke Bloembergen, 2009). Pada bulan Nopember, A. E. van der Lely seorang mantan komisaris polisi kelas satu di Batavia diangkat sebagai kepala unit reseerse tersebut (Takashi Shiraishi, 1990).

Popularitas ARD di kalangan kaum pergerakan sangat besar sebagai sebuah badan yang mengawasi gerak-gerik mereka. ARD dianggap sebagai momok yang dapat membahayakan mereka kapan saja. Akan tetapi kaum pergerakan lebih mengenal ARD sebagai PID. Dalam biografi beberapa tokoh pergerakan, mereka lebih sering menyebut dinas ini dengan sebutan PID padahal PID telah dibubarkan sejak tahun 1919 dan digantikan dengan ARD. Bahkan dalam *Memorie van Overgave* (MvO) Komisaris Besar Polisi P. Dekker, Dinas Intelijen Politik ini tetap disebut dengan nama *Politeke Inlichtingen Dienst* (PID).

## 2. Peran *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID)

Tujuan pembentukan PID secara umum adalah untuk melaksanakan pengamanan politik di Hindia Belanda. Guna melaksanakan tugas tersebut perlu adanya suatu sistem atau jaringan yang khusus. Dinas Intelijen Politik berkedudukan di bawah komando Jaksa Agung dan Gubernur Jenderal sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan tugasnya, PID bekerjasama dengan *Gewestelijke Recherche* (GR) yaitu sebuah dinas yang memiliki tugas untuk menyelidikan kegiatan politik di daerah-daerah dengan tetap di bawah pengawasan PID.

Jaringan pengamanan politik di Hindia Belanda tidak berhenti di level tersebut, di bawah GR terdapat *Bestuurspolitie* (Polisi Pamong

Praja) dan *Veldpolitie* (Polisi Lapangan). Selanjutnya lebih ke bawah lagi, kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pergerakan dilakukan oleh *Agenten* (agen-agen) dan *Spionnen* (mata-mata).

Pengamatan, pengawasan, serta kontrol yang dilakukan oleh PID kemudian disusun dalam laporan bulanan atau tiga bulanan. Laporan yang disusun oleh PID ini tidak saja dikirim ke pemerintah pusat, melainkan juga disebar ke kalangan pejabat tinggi pemerintahan di instansi pemerintahan lainnya di seluruh Hindia Belanda. Laporan yang dibuat oleh PID yang sering disebut dengan “Laporan Polisional-Politik” terbit secara berkala dari maret 1927 sampai Agustus 1941 (Marieke Bloembergen, 2009).

Jaringan pengamanan politik seperti yang telah disebutkan di atas memiliki beberapa tugas atau strategi dalam melaksanakan pengamanan politik di Hindia Belanda. Strategi-strategi yang digunakan yaitu:

**a. Pengawasan Organisasi dan Tokoh Pergerakan**

Fungsi utama dibentuknya Dinas Intelijen Politik di Hindia Belanda yaitu untuk melakukan pengawasan organisasi dan tokoh pergerakan secara ketat. Rapat serta pertemuan yang diadakan oleh kaum pergerakan diatur oleh Pemerintah Kolonial. Kewenangan Dinas Intelijen Politik dalam melakukan pengawasan terhadap kaum pergerakan semakin besar ketika dikeluarkan peraturan baru mengenai hak berkumpul dan berserikat, yang diberlakukan sejak 1 September 1919 (Marieke Bloembergen, 2009). Peraturan tersebut diantaranya mengatur bahwa setiap rapat atau kongres harus mendapatkan ijin dari pejabat setempat serta dalam pelaksanaannya polisi berhak mengawasi dan menghadirinya. Slamet Mulyana (2008) menjelaskan, jika rapat atau kongres sudah terlalu radikal maka PID berhak memperingatkan atau bahkan membubarkannya. Peringatan diberikan kepada para peserta kongres atau rapat jika mereka

mencoba untuk membakar semangat peserta rapat dengan pidato-pidato yang bersifat radikal. Pengawasan yang dilakukan oleh PID tidak hanya ketika dilaksanakan kongres atau rapat, melainkan juga dalam kegiatan sehari-hari sebuah organisasi pergerakan. Beberapa organisasi yang menjadi target utama pengawasan PID diantaranya yaitu Sarekat Islam (SI), Partai Komunis Indonesia (PKI), serta Partai Nasional Indonesia (PNI). Organisasi-organisasi tersebut pada saat itu memiliki anggota banyak sekali sehingga PID sangat mewaspadai kegiatan mereka. Selain melakukan pengawasan terhadap organisasi politik, PID juga bertugas untuk mengawasi tokoh pergerakan. Para petinggi-petinggi organisasi pergerakan menjadi target utama dari pengawasan Dinas Intelijen Politik, termasuk Tjokroamonoto, H. Misbach, dan tokoh SI lainnya. Tokoh-tokoh pergerakan menjalani beberapa prosedur hingga akhirnya mereka ditangkap. Prosedur dimulai pada masa resisiri oleh *inlanders* dibuntuti ke sana ke sini, kemudian ditangkap dan dibuang.

**b. Infiltrasi Agen – agen Intelijen**

Infiltrasi agen-agen intelijen dapat diartikan bahwa Pemerintah Kolonial melakukan pengawasan dengan menyusupkan agen-agensya untuk mengawasi sebuah organisasi. Infiltrasi agen Dinas Intelijen Politik pernah dilakukan Pemerintah Kolonial dalam mengawasi kegiatan Sarekat Islam. H. Agus Salim yang dalam perkembangannya kemudian menjadi salah satu petinggi SI pernah menjadi agen mata-mata Dinas Intelijen Politik (Marieke Bloembergen, 2009). Ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang mata-mata, Agus Salim disusupkan ke dalam tubuh SI untuk melakukan pengawasan secara lebih dekat. A.P.E. Koerver (1985) berpendapat bahwa, “Laporan Salim adalah laporan yang paling menarik tentang kegiatan Sarekat Islam. Selain itu, laporan

ini sangat penting artinya untuk mengetahui perkembangan SI pada tahun-tahun puncaknya” (hlm. 69).

**c. Penangkapan dan Pengasingan Tokoh Pergerakan**

Penangkapan merupakan tahapan terakhir dalam upaya penjinakan pergerakan oleh Pemerintah Kolonial. Keputusan penangkapan dan pengasingan tokoh pergerakan semua bergantung pada keputusan dari Gubernur Jenderal sebagai pemegang hak tertinggi dalam penerapan *Exorbitante Rechten*. *Exorbitante Rechten* merupakan hak luar biasa yang dimiliki oleh Gubernur Jenderal (Susanto Tirtoprodjo, 1988). Dengan adanya hak *Exorbitante Rechten* tersebut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, siapa saja yang oleh PID dianggap berbahaya terhadap ketentraman umum (ketentraman imperialis Belanda) maka orang tersebut boleh ditangkap, dipenjara, sebelum dibuang di daerah Hindia Belanda atau diluarnya (Tan Malaka, 2008). Selama masa pergerakan, tidak kurang dari 13.000 orang ditangkap di seluruh Hindia Belanda. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemberontakan-pemberontakan susulan, sebanyak 1.300 orang dikenai hukuman interniran berdasarkan *Exorbitante Rechten* atau hak-hak kekuasaan yang luar biasa Gubernur Jenderal (Marieke Bloembergen, 2009). Mereka diasingkan ke kamp-kamp yang dibangun khusus di Boven Digoel, tempat pengasingan yang secara khusus dibangun untuk mereka di pinggir Sungai Digul di Irian Barat (Takashi Shiraishi, 1990).

**d. Sensor Media Cetak Pergerakan**

PID juga memiliki tugas untuk mengawasi dengan ketat penerbitan, media cetak, maupun media penyebar informasi lainnya (*Memorie van Overgave* (MvO) P. Dekker). Pengawasan terhadap media cetak dilakukan agar Pemerintah Kolonial mendapatkan informasi mengenai pemberitaan yang diberikan oleh media cetak Pergerakan kepada masyarakat. Koran atau penerbitan yang

dianggap dapat mengganggu jalannya ketertiban umum diawasi dengan ketat. PID diberi wewenang untuk menyensor koran-koran pergerakan melalui peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai adanya hak untuk melakukan sensor. Pemerintah melalui Dinas Bea-Cukai dan Dinas Pos dapat menahan barang cetakan yang diperkirakan mengandung artikel-artikel yang bersifat “menyebarkan kebencian atau menghasut”, dan mengirim satu eksemplar kepada Jaksa Agung untuk diperiksa.

**e. Pengawasan Penduduk Asing**

Selain mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh rakyat pribumi, PID juga memiliki tugas untuk mengawasi penduduk-penduduk asing yang tinggal, datang, maupun pergi di wilayah Hindia Belanda. Pengawasan terhadap orang asing yang keluar masuk Hindia Belanda perlu dilakukan karena para tokoh pergerakan tidak hanya tinggal di batas-batas negeri sendiri, tetapi juga berhubungan dengan negeri-negeri lain yang mengatur aksi terhadap komunisme secara internasional (Rutgers, 2012). Jadi, Pemerintah Kolonial harus mewaspadai segala kegiatan keluar masuk di Hindia Belanda. Orang asing yang perlu diawasi kegiatannya yaitu orang-orang Eropa, Jepang, dan Cina (*Memorie van Overgave* (MvO) P. Dekker).

Strategi pengamanan politik yang dilaksanakan oleh PID tersebut sesuai dengan peran yang harus dijalankannya. Melalui cara-cara seperti yang tersebut di atas, tujuan pembentukan PID akan tercapai, yaitu mengamati dan mengawasi kemungkinan adanya ancaman luar negeri dan aktivitas-aktivitas revolusioner dalam negeri (Marieke Bloembergen, 2009). Strategi-strategi tersebut tidak lain sebagai salah satu cara untuk mempertahankan stabilitas politik Pemerintah Kolonial.

### 3. Dampak Pembentukan *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID)

PID yang memiliki wewenang besar dalam mengendalikan pergerakan yang terjadi di Hindia Belanda ternyata membuat tokoh-tokoh pergerakan mengalami kesulitan dalam melakukan pergerakan. Sikap keras terhadap kelompok-kelompok kiri dari pergerakan nasional dilakukan dengan penggeledahan-pengeledahan, penahanan-penahanan, penuntutan-penuntutan terhadap pers, larangan-larangan bersidang secara berturut-turut berlaku di Hindia Belanda (Rutgers, 2012). Dampak pembentukan PID ini benar-benar dirasakan oleh kaum pergerakan di awal tahun 1930-an. Cahyo Budi Utomo (1995) menyebut masa tersebut dengan “Krisis Pergerakan”. Politik “Tangan Besi” yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal De Jonge berhasil melumpuhkan gerakan nasional yang bersikap radikal (Slamet Muljana, 2008).

Cahyo Budi Utomo (1995) menjelaskan bahwa terjadinya krisis pergerakan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu; (1) krisis *Malaise* 1929/1930 yang melanda dunia; (2) Diterapkannya pembatasan hak untuk berkumpul dan berserikat; (3) Gubernur Jenderal dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan *law and order* (*Koninklijk Besluit* 1 September 1919); dan (4) Banyak tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia yang diasingkan.

Krisis yang terjadi pada awal 1930-an, membuat organisasi pergerakan meninggalkan prinsip nonkooperasi dan menerima jabatan-jabatan sebagai wakil-wakil dalam dewan rakyat (Cahyo Budi Utomo, 1995). Dalam periode tahun tersebut, partai-partai politik menjalankan taktik parlementer yang moderat. Satu-satunya cara bagi gerakan nasionalis untuk mengusahakan perubahan adalah dengan jalan memengaruhi Pemerintah Kolonial Belanda secara langsung melalui dewan perwakilan tersebut, tidak dengan mengatur dukungan massa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **ARSIP**

Koleksi ANRI, *Archief van het Binnenlandsch Bestuur : Memorie van Overgave* (MvO) Komisariss Besar Polisi P. Dekker tanggal 17 Juni 1939.

Koleksi ANRI, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1919 nomor 27.

### **BUKU**

Aboe Bakar Loebis. (1992). *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku, dan Saksi*. Jakarta: UI-Press.

Adams, Cindy. (1966). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Terj. Mayor Abdul Bar Salim. Jakarta: Gunung Agung. (Buku asli diterbitkan 1965).

Alexandra Retno Wulan, dkk. (2006). *Negara, Intel, dan Ketakutan*. Jakarta: Kanisius

Ambar Wulan. G. (2009). *Polisi dan Politik: Intelijen Kepolisian pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Baudet, H. dan I. J. Brugmans. (1987). *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Terj. Amir Sutaarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (Buku asli diterbitkan 1961).

Bloembergen, Marieke. (2011). *Polisi Zaman Hindia Belanda : Dari Kepedulian dan Ketakutan*. Terj. Tristam P. Moeliono, dkk. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. (Buku asli diterbitkan 2009).

Cahto Budi Utomo. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia : dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Daliman. (2012). *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX : Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Yogyakarta: Ombak.

Dudung Abdurahman. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Eisenstadt, SN. (1986). *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Terj. Chandra Johan. Jakarta: CV. Rajawali. (Buku asli diterbitkan 1978)



- Helius Sjamsuddin. (1996). *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, Jalan Pintu Satu.
- Kuntowijoyo. (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Lapian. A.B. (Ed). (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah : Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Leo Agung S. (2002). *Sejarah Intelektual*. Salatiga: Widya Sari Press.
- Marwati Djoened Poeponegoro dan Nugroho Notosusanto. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moedjanto. G. (1988). *Indonesia Abad ke-20 1 : dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Momon Abdul Rahman, dkk. (2006). *Pergerakan Mahasiswa pada Masa Hindia Belanda : Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia 1926-1942*. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.
- Muradi. (2009). *Penantian Panjang Reformasi POLRI*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nugroho Notosusanto. (1971). *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nur Syam. (2009). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Poespoprodjo. (1986). *Jejak-jejak Sejarah 1908-1926 : Terbentuknya Suatu Pola*. Bandung: Penerbit Remajda Karya.
- Poeze, Harry A. (1988). *Tan Malaka : Pergulatan Menuju Republik 1891-1925*. Terj. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. (Buku asli diterbitkan 1976).
- Pramoedya Ananta Toer. (2006). *Tetralogi : Rumah Kaca*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Pringgodigdo. A.K. (1984). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dhian Rakyat.

- Rutgers, S.J. (2012). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Sartono Kartodirdjo. (1990). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shiraishi, Takashi. (1997). *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*. Terj. Hilmar Farid. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. (Buku asli diterbitkan 1990).
- \_\_\_\_\_. (2001). *Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial*. Terj. Endi Haryono, dkk. Yogyakarta: LKiS. (Buku asli diterbitkan 2001).
- Sutherland, Heather. (1983). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Tan Malaka. (2008). *Dari Penjara ke Penjara*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.